

**KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH YANG DIPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI  
DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
27 KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE  
2015-2017  
(Pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat)**

**THE INDEPENDENCE OF REGIONAL FINANCIAL AFFECTED BY ECONOMIC GROWTH  
AND LOCAL REVENUE 27 REGENCIES/CITIES IN WEST JAVA PROVINCE PERIOD FROM  
2015-2017  
(Case study of Central Bureau of Statistics)**

**MUTIA AYUSTIN**

**Pembimbing:  
Dr. Ony Widilestariningtyas, SE., M.Si., Ak., CA**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Komputer Indonesia  
Email: [mutiaayustin@gmail.com](mailto:mutiaayustin@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is aimed to examine 1) Influence of economic growth, to the independence of regional financial, 2) effect of local revenue to the independence of regional financial on regencies/cities in West Java Province. Where the level independence financial area is still low, for some regencies/cities in the province of west java.*

*The data utilizes is secondary data obtained from the Central Bureau of Statistic (BPS) of West Java Province. Financial statistics from each regencies/cities in West Java as population from the year 2015 to 2017 and regional bruto domestic products from the year 2015 to 2017. The sample set is determined by use propositive sampling technique, as 27 regencies/cities in West Java. In this study using descriptive and verification methods with a quantitative approach. The statistical test is multiple regression analysis, analysis, determinant analysis, hypothesis test (t test).*

*The result showed that, Economic Growth impact positively significant on The Independence of Regional Financial and Local Revenue impact positively significant on The Independence of Regional Financial.*

**Keywords: Economic Growth, Local Revenue and The Independence of Regional Financial**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan suatu daerah dibutuhkan kemandirian daerah tersebut ditandai oleh kewenangan pemerintah daerah dengan melakukan peningkatan mutu pelayanan publik dan perbaikan diberbagai sektor yang berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah (Sintia, 2017). Pelaksanaan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Tolosang, 2018). Salah satu upaya untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, dibutuhkan kemandirian dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri (Djaenuri, 2012:87).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah yang terfokus pada otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor

25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya, yang bertujuan pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan difokuskan pada penggalan dana mobilisasi sumber pendapatan daerah (A Imam Zulfikar, 2019).

Adapun fenomena terkait dengan kemandirian keuangan daerah yaitu ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer berupa bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah dan Desa (TKDD) masih sangat tinggi yang menjadikan kemandirian daerah menjadi rendah. Secara rata-rata nasional ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. (Sri Mulyani, 2019). Salah satunya pada Kota Sukabumi tahun 2017, dimana RAPBD mengalami penurunan sebesar 7,18%, yang dimana menurut Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, APBD merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di daerah (Ahmad, 2016).

Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran kuantitatif yang mendeskripsikan perkembangan suatu perekonomian di tahun tertentu dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya dalam bentuk persentase (Sukirno, 2011:9). Menurut Buku PDRB Provinsi Jawa Barat berdasarkan Lapangan Usaha (2013-2017), Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Fenomena terkait pertumbuhan ekonomi, yaitu perlambatan

pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2017 khususnya pada Kabupaten Indramayu periode 2015 mengalami keterlambatan di angka 5,97%, karena pertumbuhan industri di Kabupaten Indramayu tidak signifikan. Menurut petugas Neraca dan Analisis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indramayu, lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indramayu disebabkan juga beberapa sektor, salah satunya sektor pertanian (Wijayanti, 2016).

Sumber pembiayaan yang paling penting yang digali oleh pemerintah daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi wilayah itu sendiri (Djaenuri, 2012:88). Komponen utama dari PAD yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan (BUMN/BUMD) dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pemerintah mempunyai hak dan wewenang secara luas untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah yang dimilikinya guna membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah sehingga implementasi dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai penggerak dari suatu pembangunan pada pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Saprudin, 2018). Fenomena terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak memiliki kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya Pajak Reklame di Kabupaten Pangandaran yang keberadaannya menjadi alat promosi di ruang publik yang menjadi sumber pemasukan bagi kas daerah (Hendra Suhendar, 2016). Namun pada kenyataannya para pemilik reklame masih banyak yang tidak taat membayar pajak (Hendra Suhendar, 2016).

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi serta untuk menguji kebenaran guna pemecahan masalah mengenai Kemandirian Keuangan Daerah yang Dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji besarnya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini untuk memecahkan masalah yaitu Kemandirian Keuangan Daerah yang belum mandiri, Pertumbuhan Ekonomi berjalan lambat dan Pendapatan Asli Daerah yang belum dikelola maksimal. Penelitian ini memberikan solusi permasalahan kemandirian keuangan daerah yang belum mandiri melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan asli daerah

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Menguji kebenaran pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dengan unit analisis pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dijadikan bahan referensi khususnya untuk peneliti lain dalam mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini..

## **II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **2.1 Kajian Pustaka**

#### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

#### **2.1.1.1 Pengertian Ekstensifikasi Pajak**

Menurut Sjafrizal (2014:156) Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan kegiatan produksi secara riil tidak termasuk kenaikan harga, dalam bentuk barang ataupun jasa dalam periode tertentu.

#### **2.1.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Sjafrizal (2014:156) tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan melihat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dapat dihitung menggunakan formula sederhana, membandingkan antara nilai PDRB dengan harga konstan pada tahun t dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

#### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Aries Djaenuri (2012:88) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.2.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Indikator Pendapatan asli daerah menurut Aries Djaenuri (2012:88) adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

### **2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Abdul Halim dan Kusufi (2007:232) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah untuk meminimalkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

Dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Kemandirian Keuangan Daerah berarti Pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri

### 2.1.3.2 Indikator Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Kemandirian Keuangan Daerah menurut Mardiasmo (2002:17) salah satunya dengan menggunakan rumus ketergantungan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dipengaruhi Oleh Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Eka Sastra (2017:100) ekonomi yang dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila ada penambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan inilah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif, sehingga mendorong meningkatnya pendapatan masyarakat yang dimana akan mempengaruhi kemandirian suatu daerah.

### 2.2.2 Pendapatan Asli Daerah Dipengaruhi oleh Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, seperti bantuan pemerintah atau dana perimbangan (Halim, 2011:232).

## 2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka peneliti menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- H<sub>2</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metode Penelitian

Menurut Tony Wijaya (2013:1) metode penelitian adalah suatu cara atau teknik yang mengarahkan peneliti untuk memilih pola dan prosedur yang sesuai dalam memperoleh data, menganalisisnya, sampai pada penyajian laporan yang baik

dan informatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

### 3.1.1 Objek Penelitian

Sedangkan menurut Indra Jaya (2019:17) objek penelitian merupakan sesuatu yang akan menjadi bahan perhatian penelitian kita.

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>), Pendapatan Asli Daerah (X<sub>2</sub>), Kemandirian Keuangan Daerah (Y).

### 3.1.2 Unit Analisis

Menurut Arikunto (2013:187) unit analisis adalah satuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat.

## 3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Umi Narimawati (2010:31) operasionalisasi variabel merupakan proses penguraian variabel penelitian keadaan sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel *dependent* (terikat) adalah kemandirian keuangan daerah sedangkan yang menjadi variabel *independent* (bebas) pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan asli daerah dengan menggunakan skala rasio.

Menurut Jonathan Sarwono (2014:9) Skala rasio merupakan skala yang mempunyai nilai 0 (nol) empiris absolut.

## 3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

### 3.3.1 Sumber Data

Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yaitu *Website*. Data tersebut bersifat kuantitatif mengenai Pertumbuhan Ekonomi (X<sub>1</sub>), Pendapatan Asli Daerah (X<sub>2</sub>), Kemandirian Keuangan Daerah (Y) pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan penelitian kepustakaan, studi lapangan dan riset online.

### 3.4 Populasi, Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

#### 3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini berupa data tahunan selama 3 tahun, Populasi dalam penelitian ini yaitu Statistik Keuangan Daerah Tahun 2013-2017 dan Produk Domestik Regional Bruto Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2013-2017.

#### 3.4.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2016:126) menyatakan bahwa sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

Sampel dalam penelitian ini berupa adalah data statistik keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2015-2017 dan Produk Domestik Regional Bruto periode 2015-2017 dengan total 81 data terkait pertumbuhan ekonomi, jumlah Pendapatan asli daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat periode 2015-2017 melalui Badan Pusat Statistik

#### 3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Jl. PH.H Mustofa No.43, Neglasari, Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, 40124.

Peneliti melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak tersebut. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Februari 2019 sampai dengan Agustus 2019

### 3.5 Metode Pengujian dan Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi) dan menggunakan analisis koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi parsial dan pengujian hipotesis.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

##### 4.1.1.1 Analisis Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan tabel 4.2 nilai rata-rata, Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik periode 2013-2017 adalah 0,26101984 atau 26%. Nilai persentase Pertumbuhan Ekonomi Terendah yaitu sebesar 0,000758 atau 0,07% yang dimiliki oleh Kota Banjar pada tahun 2016. Sedangkan untuk persentase Pertumbuhan Ekonomi tertinggi yaitu sebesar 5,979687 atau 598% yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi pada tahun 2017..

##### 4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 4.4 nilai rata-rata nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik periode 2013-2017 adalah Rp 666.608.813.032. Nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terendah yaitu sebesar Rp 66.385.348.150 yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016. Sedangkan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah tertinggi yaitu sebesar Rp 3.065.143.012.230 yang dimiliki oleh Kota Bandung pada tahun 2017.

##### 4.1.1.3 Analisis Deskriptif Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.6 nilai rata-rata kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota periode 2015-2017 adalah 0,629184 atau 62,9% dengan nilai simpangan baku sebesar 0,548312 atau 54,8%. Jumlah kemandirian keuangan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu

Kabupaten Pangandaran dengan nilai persentase 0,5249 atau 52,4%, sedangkan jumlah kemandirian keuangan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu Kota Sukabumi dengan nilai persentase 5,3609 atau 536,09% yang berarti tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah dikarenakan persentase ketergantungan yang menjadi indikator kemandirian keuangan daerah masih tinggi.

#### 4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

##### 4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, sebelumnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang *BLUE (Best Linier Unbiased Estimated)*. Pengujian asumsi ini terdiri atas empat pengujian, yakni uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

###### 1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas ini menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* atau analisis grafik *normal probability*. Jika probabilitas yang di lihat dari nilai *Asymp Sig.* > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam model berdistribusi secara normal. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 25 pada tabel 4.7 diperoleh nilai probabilitas yang di lihat dari nilai *Asymp Sig.* adalah sebesar 0,997 > 0,05, maka sesuai dengan kriteria pengujian dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi secara normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

###### 2) Uji Multikolinieritas

Cara untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas adalah dengan melihat tabel VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan nilai *tolerance* harus lebih dari 0,1. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 25 pada tabel 4.8 diperoleh hasil output VIF hitung dari kedua variabel yaitu sebesar 1,188 < 10 dan semua *tolerance* variabel bebas memiliki nilai sebesar 0,841 = 84,1% > 10%, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah.

###### 3) Uji Heterokedastisitas

Untuk model regresi yang baik adalah yang terdapat homokedastisitas atau

tidak terjadi heterokedastisitas. Homoskedastisitas terjadi jika pada *scatterplot* titik-titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 25 pada gambar 4.5, bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

###### 4) Uji Autokorelasi

Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson (DW)* dengan ketentuan tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2 dan +2 atau  $-2 < DW < +2$ . Dari hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 25 pada tabel 4.9 diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,747. Jika nilai DW diantara -2 dan +2 atau  $-2 < DW < +2$ , jadi  $-2 < 1,747 < +2$  sehingga kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.

##### 4.1.2.2 Uji Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 5,097 + 0,10(X_1) + 5,051(X_2)$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 5,097; artinya jika variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah nilainya adalah 0, maka kemandirian keuangan daerah nilainya adalah 5,097.
- b. Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) sebesar 0,10 ; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1%, maka kemandirian keuangan daerah ( $Y$ ) akan mengalami peningkatan sebesar 0,10. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian keuangan daerah,

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka kemandirian keuangan daerah akan semakin tinggi.

- c. Koefisien regresi variabel pendapatan asli daerah (X<sub>2</sub>) sebesar 5,051; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 1%, maka kemandirian keuangan daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 5,051. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka kemandirian keuangan daerah akan semakin tinggi.

#### 4.1.3 Analisis Koefisien Korelasi

##### 1) Analisis Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.12 hasil *output* dari pengolahan data, diperoleh nilai koefisien korelasi untuk pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian keuangan daerah sebesar 0,263 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara 0,20 – 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil perhitungan yang positif antara dua variabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara pertumbuhan ekonomi dengan kemandirian keuangan daerah, dimana jika pertumbuhan ekonomi naik maka kemandirian keuangan daerah akan naik pula, , artinya semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka kemungkinan terjadinya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah semakin tinggi.

##### 2) Analisis Korelasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel 4.13 hasil *output* dari pengolahan data, diperoleh nilai koefisien korelasi untuk pendapatan asli daerah sebesar 0,354 yang mana hasil tersebut masuk dalam skor interval antara

0,20 – 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara pendapatan asli daerah dengan kemandirian keuangan daerah. Hasil perhitungan yang positif antara dua variabel diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah antara pendapatan asli daerah dengan kemandirian keuangan daerah dimana jika pendapatan asli daerah naik maka kemandirian keuangan daerah akan naik pula.

#### 4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi

- a. Berdasarkan tabel 4.12 maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:  
 $K_d = (0,263)^2 \times 100\% = 6,92\%$   
Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 6,92%, sedangkan sisanya sebesar 93,08% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti tingkat pendapatan setiap sektor, pertumbuhan penduduk, akumulasi modal serta kemajuan teknologi disuatu wilayah.
- b. Berdasarkan tabel 4.13 maka diperoleh determinasi parsial dari variabel Pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah sebagai berikut:  
 $K_d = (0,354)^2 \times 100\% = 12,5\%$   
Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 12,5%, sedangkan sisanya sebesar 87,5% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti hasil kekayaan daerah, lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah serta Pajak daerah dan retribusi daerah yang dimiliki suatu wilayah yang termasuk kedalam komponen Pendapatan asli daerah yang berkontribusi besar.

#### 4.1.5 Pengujian Hipotesis

##### 1) Pengujian Hipotesis Parsial Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari tabel 4.14, terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 2,557. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  pada tabel distribusi t. Dengan  $df=n-k-1=81-2-1=78$ , diperoleh nilai  $t_{tabel}$  untuk pengujian dua pihak sebesar  $\pm 1,199$ . Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh 2,557, berada diantara nilai  $t_{tabel}$  (-1,199 dan 1,199), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap variabel kemandirian keuangan daerah.

##### 2) Pengujian Hipotesis Parsial Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Dari tabel 4.15, terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh variabel Pendapatan asli daerah sebesar 3,324. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  pada tabel distribusi t. Dengan  $df=n-k-1=81-2-1=78$ , diperoleh nilai  $t_{tabel}$  untuk pengujian dua pihak sebesar  $\pm 1,199$ . Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh 3,324, berada diantara nilai  $t_{tabel}$  (-1,199 dan 1,199), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan asli daerah terhadap variabel kemandirian keuangan daerah.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah yang Dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 0,263 yang tergolong dalam kategori lemah. Hubungan yang

bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Besar pengaruh antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 6,92% artinya sebesar 6,92% kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya sebesar 93,08% dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat pendapatan setiap sektor, pertumbuhan penduduk, akumulasi modal serta kemajuan teknologi disuatu wilayah.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  adalah  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $2,557 > 1,199$ ), sehingga pada tingkat kekeliruan 5%  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Renny Nur'ainy dkk (2013) di Kota Bandung, secara parsial dan simultan terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian keuangan daerah, dapat dilihat kemandirian keuangan daerah naik ketika pertumbuhan ekonomi meningkat melalui pembangunan.

### 4.2.2 Kemandirian Keuangan Daerah yang Dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 0,354 yang tergolong dalam kategori lemah. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan jumlah Pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Besar pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu sebesar 12,5%, artinya sebesar 12,5% kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh Pendapatan asli daerah, sedangkan sisanya sebesar 87,5% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti hasil kekayaan daerah, lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah serta Pajak daerah dan retribusi daerah yang dimiliki suatu wilayah yang termasuk kedalam



komponen Pendapatan asli daerah yang berkontribusi besar.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  adalah  $t_{hitung}$  adalah  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,324 > 1,199$ ), sehingga pada tingkat kekeliruan 5%  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Farida Khansa Nabila (2017) menyatakan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka akan mengakibatkan peningkatan kemandirian daerah..

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan indentifikasi masalah, rumusan masalah, kerangka pikir, hipotesis penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kemandirian Keuangan Daerah yang Dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pusat Statistik Jawa Barat maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan Daerah yang dipengaruhi Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota periode 2013-2017 di Badan Pusat Statistik Jawa Barat dengan hubungan lemah dan bertanda positif, dimana jika jumlah pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka kemandirian keuangan daerah akan mengalami peningkatan begitu pun jika sebaliknya.
2. Kemandirian Keuangan Daerah yang dipengaruhi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota periode 2013-2017 di Badan Pusat Statistik Jawa Barat dengan hubungan lemah dan bertanda positif, dimana jika jumlah pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka kemandirian

keuangan daerah akan mengalami peningkatan begitu pun jika sebaliknya.

## 5.2 Saran

### 1. Saran Praktis

Untuk meningkatkan meningkatkan kemandirian keuangan daerah bagi Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten/Kota melalui pertumbuhan ekonomi, sebaiknya Pemerintah Daerah lebih menggali sumber pendapatan di wilayahnya sendiri, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui pendapatan asli daerah maka disarankan bahwa Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten/Kota harus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak daerah serta retribusi daerah yang termasuk kedalam komponen yang berkontribusi besar untuk pendapatan asli daerah.

### 2. Saran Akademis

Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

Untuk peneliti lain Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini, serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain selain Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah. Selain itu, peneliti menyarankan untuk menambah periode tahun yang akan diteliti dan menambah objek lainnya agar dapat memperkuat hasil penelitian..

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Rico Putra, S. H. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal

- Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, 243-256.
- Sintia, I. (2017). Kemandirian Keuangan Daerah Berimplikasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah. 1-21.
- Tolosang, K. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 79-92.
- Aries, D. (2012). Hubungan Keuangan Pusat - Daerah elemen-elemen penting hubungan keuangan pusat-daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- A Imam Zulfikar, A. R. (2019). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Barru. *Sentralisasi*, 18-32.
- Sukirno, S. (2011). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Saprudin. (2018). Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Accounting Journal*, 47-58.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tony, W. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indra, J. (2019). *Penerapan Statistik Untuk Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Pernada Media.
- AriKunto, S. (2013). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Eka, S. (2017). *Kesenjangan Ekonomi*. Bandung: Expose.
- Farida, K. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tngkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Alokasi Belanja Modal. *E-journal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-10.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Andi.
- Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.
- Abdul, H. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Renny, N. d. (5 Oktober 2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Proceeding PESAT*, 95-104 , ISSN:1858-2559.
- Jonathan, S. (2017). *Teknik Jitu Memilih Prosedur Analisis Skripsi*. Jakarta: Elex Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

## LAMPIRAN

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Deskriptif Pertumbuhan Ekonomi**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	81	,000758	5,979687	,26101984	1,071021247
Valid N (listwise)	81				

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Deskriptif Pendapatan Asli Daerah**  
**Descriptive Statistics**

(Dalam Jutaan Rupiah)

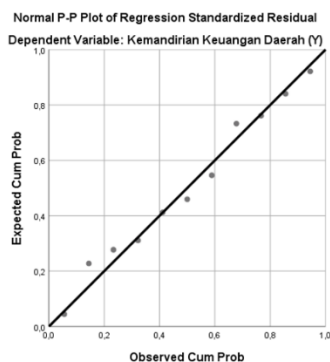
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD (X2)	81	66,385	3,065,143	666,608	638,540.91
Valid N (listwise)	81				

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Deskriptif Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian Keu Daerah (Y)	81	,05248312	5,36096	,6291847	,54831267
Valid N (listwise)	81				

**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		11
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.12964574
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.096
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z		.400
Asymp. Sig. (2-tailed)		.997
a. Test distribution is Normal.		



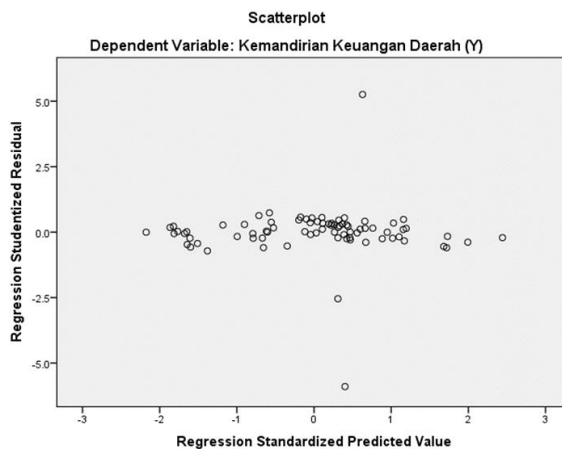
**Gambar 4.4**  
**Grafik Normalitas**

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	.841	1.188
	Pendapatan Asli Daerah (X2)	.841	1.188

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Y)



**Gambar 4.5**  
**Grafik Scatterplots**

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.825 <sup>a</sup>	.681	.601	.14495	1.747

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan\_ekonomi, Pendapatan Asli Daerah

b. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah

**Tabel 4.10**  
**Persamaan Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,097	1,610		3,166	.002
	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	,010	0,19	.059	2,557	.009
	Pendapatan Asli Daerah (X2)	5,015	1,508	.354	3,324	.001

a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

**Tabel 4.12**  
**Koefisien Korelasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Correlations**

Control Variables			Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Kemandirian Keuangan Daerah (Y)
Pendapatan Asli Daerah (X2)	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Correlation	1.000	.263
		Significance (2-tailed)	.	.579
		Df	0	77
	Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Correlation	.263	1.000
		Significance (2-tailed)	.579	.
		Df	77	0

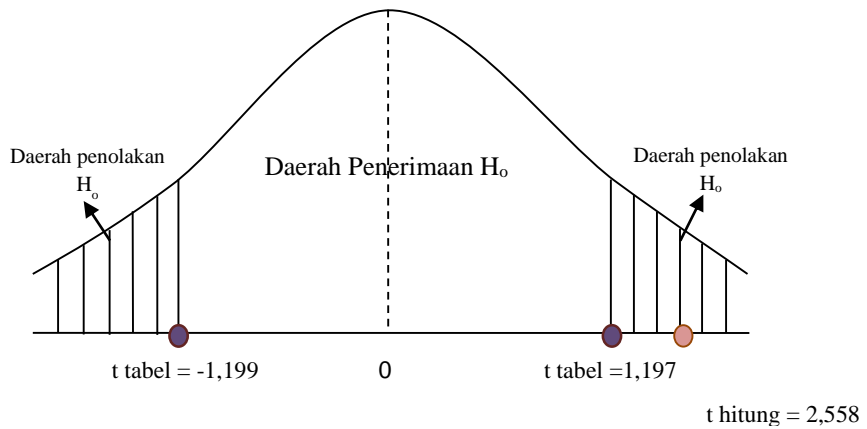
**Tabel 4.13**  
**Koefisien Korelasi Pendapatan Asli Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Correlations**

Control Variables			Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Kemandirian Keuangan Daerah (Y)
Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Pendapatan Asli Daerah(X1)	Correlation	1.000	.354
		Significance (2-tailed)	.	.001
		Df	0	77
	Kemandirian Keuangan Daerah (Y)	Correlation	.354	1.000
		Significance (2-tailed)	.001	.
		Df	77	0

**Tabel 4.14**  
**Pengujian Hipotesis Parsial Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,097	1,610		3,166	.002
	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	,010	0,19	.059	2,557	.009
	Pendapatan Asli Daerah (X2)	5,015	1,508	.354	3,324	.001

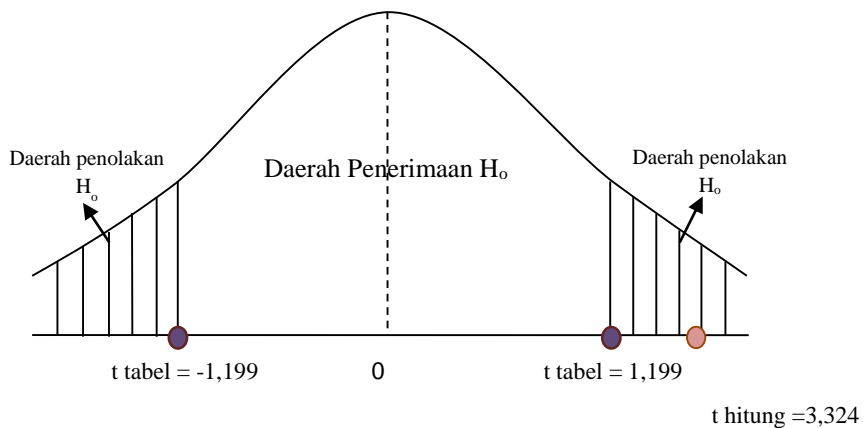
a. Dependent Variable: Kemandirian Keuangan Daerah (Y)



**Gambar 4.6**  
**Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**

**Tabel 4.15**  
**Pengujian Hipotesis Parsial Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,097	1,610		3,166	.002
	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	,010	0,19	.059	2,557	.009
	Pendapatan Asli Daerah (X2)	5,015	1,508	.354	3,324	.001



**Gambar 4.7**  
**Kurva Pengujian Hipotesis Parsial Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah**